

6 Arahan Presiden Joko Widodo

1. Perencanaan Pembangunan Daerah harus berlandaskan aspek-aspek Pengurangan Resiko Bencana
2. Pelibatan akademisi dan pakar-pakar kebencanaan secara masif untuk memprediksi ancaman, mengantisipasi, dan mengurangi dampak bencana, serta sosialisasi hasil-hasil kajian dan penelitiannya.
3. Gubernur akan secara otomatis akan menjadi komandan satgas darurat pada saat kejadian bencana, serta Pangdam dan Kapolda menjadi wakil Komandan Satgas.
4. Pembangunan Sistim Peringatan Dini yang terpadu berbasiskan rekomendasi dari pakar dikoordinasikan oleh Kepala BNPB
5. Edukasi Kebencanaan harus dimulai tahun ini, terutama di daerah rawan bencana, kepada sekolah melalui Guru dan kepada Masyarakat melalui Para Pemuka Agama.
6. Lakukan simulasi latihan penanganan bencana secara berkala dan bersinambungan



ARAHAN PRESIDEN RI

2016

ARAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO

Pada Rapat Koordinasi Nasional Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2016
Istana Negara, 18 Januari 2016



PENCEGAHAN & EARLY WARNING

- * Pangdam, Kapolda, Danramil, Kapoltab, Danramil, sampai ke Koramil dan Kapoltab, semuanya harus bergerak untuk mencegah. Jangan ditahan api satu bergerak.
- * BNPB dan Pemerintah daerah baik up TNH dan Pahi

REWARD AND PUNISHMENT

Pejabat yang lahan di daerahnya terbakar semakin banyak & besar akan diganti, sementara pejabat yang daerahnya baik dan tidak ada kebakaran lahan akan dipromosikan. Itu jeng jeng dengan Panglima TNI dan Kapoltab.

TINDAK KE LAPANGAN

Jangan hanya main-main dari belakang meja, lihat dan turun ke lapangan.

PENEGAKAN HUKUM

Lakukan langkah tegas pada pembakar hutan dan lahan, baik sanksi administrasi, pidana, maupun pendenda.

SINERGI PUSAT DAN DAERAH

Audien sinergi antar instansi pemerintah dan kabupaten/kota untuk pencegahan dan pengendalian bisa lebih efektif.

"Setelah bertahun-tahun akan meningkatnya kebakaran hutan dan lahan dengan baik, kita bisa mencegah kebakaran hutan dan lahan dengan baik."

"Tetap bekerja, jangan menunggu sampai kebakaran hutan dan lahan datang lagi"

2017

Arhan Presiden Joko Widodo
pada Simposium Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Simposium KHUTLA) 2017

LANGKAH-LANGKAH PENCEGAHAN KARHUTLA 2017



- PENETAPAN SIAGA DARURAT AT LEBIH DINI**
- MENGAKTIFKAN MASYARAKAT UNTUK TURUT MENEGAKAN KARHUTLA**
- SIAGA DALAM MELAKUKAN OPS UDARA PENCEGAHAN KARHUTLA**
- PENEGAKAN HUKUM YANG TEGAS DAN MENYERIKAN KASUS-KASUS KARHUTLA**
- PERBAIKAN TATA KELOLA HUTAN DAN LAHAN**
- KOORDINASI DAN SINERGI ANTARA PEMERINTAH DAN TINGKAT PUSAT SAMPAI DENGAN DAERAH**

2018

ARAHAN PRESIDEN RI
DALAM PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
Rakornas Kebakaran Hutan dan Lahan, Istana Negara, 6 Februari 2018



- Kebakaran hutan dan lahan menjadi penyumbang emisi terbesar di sektor kehutanan
- Indonesia mempunyai pengalaman kebakaran besar dalam tahun 1981/1982, 1997/1998, 2007, 2013 and 2015.
- Belajar dari pengalaman tersebut, Indonesia telah mengawali sejarah kesuksesan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan dalam dua tahun terakhir (2016-2017).

Peranan signifikan hotspot dan kejadian karhutla tahun 2016 dan 2017 karena kerja keras dan keterlibatan semua pihak.

Waspadai musim kemarau yang datang lebih awal, selalu monitor prediksi BMKG

Persiapan mengatasi karhutla harus segera dimulai, jangan tunggu kejadian baru bergerak. Tindakan harus dipaparkan sejak dini

Pengawasan hutan pada pelaku pembakar hutan dan lahan

Pemenuhan kewajiban untuk menjaga wilayah kerja masing-masing

Siglap sarana prasarana dan personel

Libatkan masyarakat dalam pencegahan

Sumber: Catatan Diskusi/Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Instagram: @PresidenRI, @KEMHUTAN, @KEMKUMHAM, @KEMKORPRI